

## ABSTRAK

Depy Fitriani. 2026. Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Di Lapas Kelas 1 Madiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Skripsi. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. Pembimbing (II). Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.

Pemenuhan hak kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh pemerintah, termasuk bagi warga binaan yang sedang menjalani hukuman di penjara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana tetap memiliki hak dasar, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermartabat. Namun, di lapangan, pemenuhan hak kesehatan di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kondisi yang terlalu padat, keterbatasan jumlah tenaga medis, serta fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana regulasi hukum melindungi hak kesehatan warga binaan, serta bagaimana regulasi itu dijalankan di Lapas Kelas I Madiun. Penelitian menggunakan metode campuran, yaitu menggabungkan pendekatan hukum normatif dan hukum sosial. Data diperoleh dari studi peraturan hukum dan juga dari wawancara serta observasi langsung di Lapas Kelas I Madiun. Data kemudian dianalisis secara kualitatif secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara aturan, perlindungan hukum tentang hak kesehatan warga binaan sudah cukup lengkap sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak kesehatan di Lapas Kelas I Madiun masih belum maksimal. Hambatan utama terdiri dari kondisi lembaga yang terlalu penuh, sarana kesehatan yang tidak mencukupi, serta jumlah tenaga medis yang masih kurang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran pemerintah dengan memperbaiki fasilitas kesehatan, menambah jumlah tenaga medis, serta bekerja sama dengan pihak luar untuk memastikan hak kesehatan warga binaan dapat terpenuhi secara baik dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, hak kesehatan, warga binaan pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan.

## ABSTRACT

Depy Fitriani. 2026. *Legal Protection And Fulfillment Of The Right To Health For Correctional Inmates At Class I Madiun Correctional Facility Based On Law Number 22 Of 2022 On Corrections*. Thesis. Law Study Program, Faculty of Law, PGRI Madiun University. Supervisor (I) Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H. (II) Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.

*The fulfillment of the right to health is an integral part of human rights that must be guaranteed by the government, including for inmates serving sentences in correctional institutions. Law Number 22 of 2022 concerning Corrections affirms that prisoners continue to possess fundamental rights, one of which is the right to obtain proper, safe, and dignified health services. However, in practice, the fulfillment of health rights in correctional institutions still faces various challenges, such as overcrowded conditions, the limited number of medical personnel, and inadequate health facilities. This research aims to examine how legal regulations protect the health rights of inmates and how these regulations are implemented at Class I Madiun Correctional Institution. The study employs a mixed-methods approach by combining normative legal research and socio-legal research. Data were obtained through the study of legal regulations as well as interviews and direct observations at Class I Madiun Correctional Institution. The data were then analyzed using qualitative descriptive methods. The results indicate that, from a regulatory perspective, legal protection of inmates' health rights is sufficiently comprehensive in accordance with Law Number 22 of 2022 and its implementing regulations. However, in practice, the fulfillment of health rights at Class I Madiun Correctional Institution has not been optimal. The main obstacles include overcrowded conditions, insufficient health facilities, and an inadequate number of medical personnel. Therefore, increased government involvement is required through improving health facilities, increasing the number of medical personnel, and cooperating with external parties to ensure that inmates' health rights are fulfilled effectively and sustainably.*

**Keywords:** *legal protection, right to health, correctional inmates, correctional institution.*